

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dicukupi oleh manusia untuk menunjang keberlangsungan hidup, Pangan adalah kebutuhan utama setiap manusia, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia. Semakin bertambahnya manusia maka akan semakin banyak permintaan terhadap pangan yang harus dipenuhi. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, hal itu dipengaruhi karena secara geografis wilayah Indonesia adalah negara kepulauan yang berfokus pada pengembangan di beberapa sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kondisi ini juga ditunjang dengan masih banyaknya Indonesia tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian.

Menurut Vini dalam Wulandari (20011), mengungkapkan bahwa dalam kemandirian pangan ada 4 faktor yang harus diperhatikan yakni, ketersediaan, aksesibilitas, keamanan, dan keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan pembangunan yang bisa dijadikan panduan dalam merumuskan strategi pembangunan secara terintegrasi terutama menyangkut strategi pengembangan ketahanan pangan masyarakat tertinggal. Strategi pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian di pedesaan merupakan langkah konkrit mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan merata. Indonesia sebagai negara agraris tentunya harus memiliki prinsip kemandirian pangan.

Oleh karena itu Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya dengan mengeksplorasi sumber pangan lokal. Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan menempati urutan ke 4 di dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tentunya akan mempengaruhi kebutuhan negara untuk melayani masyarakatnya cukup banyak dan pada tahun-tahun yang akan datang akan semakin terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga dengan banyaknya penduduk Indonesia maka salah satu kebutuhan yang mendesak adalah dalam hal pangan.

Menurut Suryana dalam Achmad (2008) ketahanan pangan dan kemandirian pangan rumah tangga saling berkaitan satu sama lainnya dengan kemampuan rumah tangga petani dalam upaya pemenuhannya. Jika rumah tangga petani tersebut mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya dari hasil produksi sendiri, atau dari hasil pendapatan yang diperolehnya untuk membeli pangan, maka dikatakan rumah tangga tersebut termasuk ke dalam mandiri pangan dan sebaliknya jika hasil dari usaha taninya tidak mampu memenuhinya maka dapat dikatakan tidak mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan pangannya. Ketahanan dan kemandirian pangan rumahtangga petani dua konsep yang berbeda.

Menurut Husodo dalam Lukman (2004) secara nasional konsumsi akan kebutuhan beras dapat mencapai 36 juta ton pada tahun 2035 dengan komposisi banyak penduduk diperkirakan mencapai sekitar 400 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,6 persen per tahun, sedangkan pada tahun 2001 hanya mencapai sekitar 29 juta ton. Untuk mencapai kecukupan beras yang terus meningkat dihadapkan pada berbagai tantangan seperti: Menurut Pakpahan (2008) dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menjamin tentang salah satu hak asasi manusia yaitu pangan dinyatakan bahwa hak setiap orang untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi sama prinsipnya dengan hak memperoleh pangan yang cukup dan hak asasi manusia untuk bebas dari kelaparan

Permasalahan utama dalam mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional pertumbuhannya melambat bahkan stagnan disebabkan oleh adanya degradasi sumber daya lahan, kerusakan infrastruktur irigasi, serta kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan air. Ketidakseimbangan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan kapasitas produksi nasional tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan meningkatnya penyediaan pangan nasional yang berasal dari impor. Desa Tanjungpura memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak, terutama dalam hal pertanian. Hal ini seharusnya bisa menjadi nilai yang bisa dimanfaatkan. Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Tasikmalaya dalam

bentuk laporan yang berjudul Rajapolah Dalam Angka 2020, pada tahun 2018 Desa Tanjungpura memperoleh hasil produksi panen sebanyak 17.899 ton.

Dengan luas mencapai 157.280 hektar dan jumlah penduduk mencapai 4.308 jiwa dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani. Maka seharusnya desa Tanjungpura bisa memenuhi keperluan pangan untuk masyarakat Desa Tanjungpura, namun nyatanya hal itu berbanding terbalik, sebagaimana yang dicantumkan dalam laporan BPS Kabupaten Tasikmalaya 2020 mengenai tahapan keluarga sejahtera Desa Tanjungpura hanya memiliki 1.298 keluarga yang masuk dalam tahap keluarga sejahtera, hal ini diperkuat dengan Laporan BPS Kabupaten Tasikmalaya mengenai jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya pada September 2014 sejumlah 199.346 jiwa telah berkurang dibanding September 2013 sejumlah 201.200 jiwa. Pada September 2013, jumlah ini menduduki peringkat 17 terkecil dibanding 26 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Peningkatan berdasarkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, Kabupaten Tasikmalaya menduduki peringkat 10 di Jawa Barat dengan nilai 11.57% atau turun dibanding September 2012 sebesar 11.60% .

Masyarakat Desa Tanjungpura masih belum bisa mengolah dan mengelola secara maksimal. Para petani di Desa Tanjungpura kebanyakan adalah para penggarap buka asli pemilik lahan pertanian. Banyak para petani yang menggantungkan keberlanjutan penggarapan lahannya pada hasil panen, jikalau hasil panen sedang tidak bagus maka itu dapat mempengaruhi keberlangsungan penggarapan lahan, banyak juga yang memutuskan untuk beralih profesi. Permodalan menjadi permasalahan yang penting bagi para petani, perlu adanya sebuah system untuk menjalankan siklus pertanian menjadi lebih baik, maka dari itu program Desa Berdikari salah satunya hadir di Desa Tanjungpura untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul ***“Program Desa Berdikari Dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Bagi Masyarakat Desa Tanjungpura Kecamatan Rajapolah”***.

1.2. Identifikasi Masalah

Mendasari pada penelitian ini dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Hasil pertanian dari masyarakat desa banyak yang dijual ke luar desa tidak diutamakan untuk warga desa setempat.
- 1.2.2. Hasil pertanian yang diperoleh belum cukup untuk menutupi kebutuhan pangan masyarakat .
- 1.2.3. kurangnya modal para petani atau penggarap lahan ketika akan memulai kembali melakukan proses pengembangan lahan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah bagaimana proses Program Desa Berdikari dalam mewujudkan kemandirian pangan masyarakat Desa Tanjungpura Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari permasalahan tersebut yaitu mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Desa Berdikari dalam mewujudkan kemandirian pangan masyarakat Desa Tanjungpura Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

1.5. Kegunaan Penelitian

- 1.5.1. Kegunaan secara teoritis
 - 1.5.1.1. Sebagai bahan literatur dan kajian pengetahuan bagi jurusan pendidikan masyarakat.
 - 1.5.1.2. Sebagai bahan perbandingan, pertimbangan dan pengembangan pada penelitian akademisi dimasa mendatang.
- 1.5.2. Kegunaan praktis
 - 1.5.2.1. Bagi peneliti, bahan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan, pemahaman serta pengalaman tentang pengembangan masyarakat melalui program Desa Berdikari.

1.5.2.2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai pengembangan masyarakat dalam membangun kemandirian untuk masyarakat itu sendiri.

1.5.2.3. Bagi pengelola program desa bedikari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi program atau kegiatan yang telah berjalan.

1.6. Definisi Operasional

1.6.1. Pengembangan masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah upaya untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial yang lebih baik lagi, pengembangan masyarakat secara dalam fokusnya yaitu dalam menolong dan membantu baik secara pendidikan sosial, ekonomi maupun lainnya. Dalam praktiknya, para pelaku pengembangan masyarakat menguraikan terlebih dahulu masalah yang ada lalu kemudian dikerucutkan mana yang lebih untuk diberikan solusi yang dihadapi masyarakat, potensi sumber daya alam yang ada diuraikan untuk ditelaah agar bisa dimanfaatkan dengan penyelarasan bersama lembaga lokal baik dari segi kekuasaan maupun keberdayaannya.

1.6.2. Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung oleh lembaga ketahanan pangan, dan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau serta didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. mandiri pangan merupakan suatu keadaan dimana masyarakat dapat memproduksi pangan sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber pangan yang ada disekitar mereka secara kolektif maupun individu.

1.6.3 Program Desa Berdikari

Program Desa Berdikari merupakan program yang berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Program Desa Berdikari menitik bertkan pada kemajuan ekonomi, SDM yang unggul dan religius, serta berfokus pada kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas keluarga dengan diharapkan perubahan perilaku masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.